

**TESIS**

**KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI  
INDONESIA**

**SITI HAIRIAH**

**NIM. 2220216320081**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2024**

**TESIS**

**KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI**

**INDONESIA**

**SITI HAIRIAH**

**NIM. 2220216320081**

**Tesis**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar**

**(SITI HAIRIAH, SH., M.Kn)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

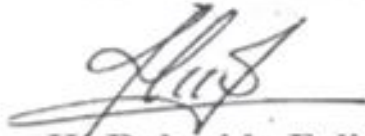
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**2024**

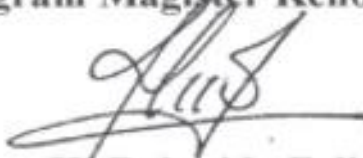
Tesis ini  
telah diperiksa dan disetujui  
pada Tanggal.....

**PEMBIMBING**



**Hj. Rahmida Erliyani**  
**NIP. 19730420 200312 2002**

**Diketahui oleh**  
**Koordinator Program Studi**  
**Pogram Magister Kenotariatan**



**Hj. Rahmida Erliyani**  
**NIP. 19730420 200312 2002**

**Diketahui oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**



**Achmad Faishal**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

RINGKASAN  
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI  
INDONESIA

Oleh :

Siti Hairiah,<sup>1</sup> Pembimbing Utama<sup>2</sup>

perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan antar dua orang yang hidup di Indonesia yang memiliki kewarganegaraan berbeda serta menganut hukum yang berbeda oleh karena perbedaan asal negaranya dimana salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia dan menganut hukum positif Indonesia sedangkan pihak yang lainnya memiliki kewarganegaraan asing dan menganut hukum negara asalnya. pelaksanaan Perkawinan Campuran tanpa Perjanjian Kawin tidak lepas dari kendala-kendala serta risiko-risiko yang dapat menimbulkan problematika yang dihadapi oleh para pelaku Perkawinan Campuran itu sendiri. Salah satu problematika yang timbul adalah berkaitan dengan terjadinya Harta Bersama sebagai akibat hukum yang timbul karena dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum dari kepemilikan hak atas tanah dari perkawinan campuran di Indonesia.

Hak Pemilikan yang sama bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tersebut dalam harta bersama ini menjadi suatu dilema ketika yang menjadi objek harta bersama adalah berupa Pemilikan Hak Milik atas tanah yang secara tegas diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA), yang menyatakan bahwa Hak Milik atas tanah hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Apabila Warga Negara Asing (WNA) sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut memperoleh Hak Milik atas tanah karena percampuran harta karena Perkawinan tanpa Perjanjian Kawin, maka harus melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut, serta tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung, sebagaimana diatur didalam Pasal 21 ayat (3) UUPA.

---

<sup>1</sup> NPM : 2220216320081

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

## KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA

### ABSTRAK

Oleh :

Siti Hairiah,<sup>3</sup> Pembimbing Utama<sup>4</sup>

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Kata Kunci : Keabsahan, Perkawinan Campuran, Pelepasan Hak Atas Tanah

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum dari kepemilikan hak atas tanah dari perkawinan campuran di Indonesia. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu menjawab isu hukum dengan cara menggambarkan, menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian *Pertama* : Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami istri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. Adanya percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan dan pasangan berstatus Warga Negara Asing akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut. Warga Negara Indonesia yang ingin tetap memiliki Hak Atas Tanah setelah melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing, harus membuat perjanjian perkawinan atau pranikah. Perjanjian ini mengatur tentang pemisahan harta suami istri. Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. *Kedua* : Warga Negara Asing (WNA) sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut memperoleh Hak Milik atas tanah karena percampuran harta karena Perkawinan tanpa Perjanjian Kawin, maka harus melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut, serta tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung, sebagaimana diatur didalam Pasal 21 ayat (3) UUPA. Status hak milik atas tanah yang tidak dilepas oleh ahli waris yang menjadi warga negara asing adalah menjadi hapus karena hukum setelah melewati jangka waktu satu tahun dari ketentuan UUPA dan tanahnya dikuasai langsung oleh negara. Setelah itu eks pemilik yang memiliki hak milik atas tanah waris itu diberikan kesempatan adanya permintaan kembali tanah bersangkutan dengan hak yang bisa dimilikinya.

---

<sup>3</sup> NPM : 2220216320081

<sup>4</sup> Pembimbing Utama

## OWNERSHIP OF LAND RIGHTS FROM MIXED MARRIAGES IN INDONESIA

By :

Siti Hairiah,<sup>5</sup> Pembimbing Utama<sup>6</sup>

Master of Notarial Studies, Lambung Mangkurat University

## ABSTRACT

Keywords : Validity, Mixed Marriage, Release of Land Rights

The purpose of this research is to analyse the legal certainty of ownership of land rights from mixed marriages in Indonesia. By using normative juridical research, this research is prescriptive in nature, namely answering legal issues by describing, examining, studying, and explaining precisely and analysing applicable laws and regulations as well as various legal expert opinions, with the aim of obtaining answers to the problems raised. *First Research Result*: Joint property is property obtained during the marriage bond and therefore it becomes the joint property of husband and wife. Because of this nature, the husband and wife can act only on mutual consent on joint property. The existence of a mixture of property obtained after marriage and a foreign national spouse will also become the owner of the joint property. Indonesian citizens who want to continue to own land rights after marrying a foreign citizen, must make a marriage or prenuptial agreement. This agreement regulates the separation of husband and wife's assets. The marriage agreement is regulated in Article 29 of the Marriage Law. *Second* : obtain a Hak Milik (right of ownership) to land due to the mixing of assets due to Marriage without a Marriage Agreement, then must relinquish the right within a period of 1 (one) year from the acquisition of the right, and the land falls to the state, provided that the rights of other parties that burden it continue, as stipulated in Article 21 paragraph (3) of the UUPA. The status of land ownership rights that are not released by heirs who become foreign nationals is nullified by law after passing the one-year period of the UUPA provisions and the land is directly controlled by the state. After that, the former owner who has a property right to the inherited land is given the opportunity to request the land back with the rights he can have.

---

<sup>5</sup> NPM : 2220216320081

<sup>6</sup> Pembimbing Utama

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Hairiah  
NIM : 2220216320081  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Siti Hairiah  
NIM. 2220216320081

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji, hormat dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **“KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA”**.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Ibu Dr. Hi. Rahmida Erlivani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
5. Kepada Orang Tua penulis Bapak Johan dan Ibu Rusmawarti, kakak dan adik-adik penulis, teman sahabat, orang-orang tersayang, seseorang yang istimewa, dan terutama kepada si penulis sendiri yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan motifasi kepada penulis untuk segera dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis



Siti Hartinah

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>RINGKASAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Keaslian Penelitian .....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
E. Metode Penelitian .....	17
F. Tinjauan Pustaka .....	21
1. Tinjauan Konseptual .....	21
2. Tinjauan Pustaka .....	35
G. Metode Penelitian .....	42
H. Sistematika Penulisan .....	49
<b>BAB II KEABSAHAN STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN</b> .....	51

A. Pengaturan Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.	51
B. Keabsahan Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Merupakan Harta Bersama dalam Sistem Hukum di Indonesia .....	57
<b>BAB III MEKANISME PELEPASAN HAK ATAS TANAH DARI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN .....</b>	<b>65</b>
A. Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah WNA dalam Perkawinan Campuran .....	65
B. Akibat Hukum WNA yang Tidak Melepas Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran .....	73
<b>PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>